

Pelaksanaan Lelang Online Pesawat Ex Pelita Air Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong Ditinjau Dari Asas Hukum Lelang = Implementation of Online Auction Aircraft Ex Pelita Air At State Service Office and Serpong Auction Judging From The Legal Principles Auction

Samosir, Ferry Samuel Christoffer, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531629&lokasi=lokal>

Abstrak

Ketentuan akan keharusan adanya NPWP bagi peserta lelang melalui internet (lelang online) menjadi kontra produktif bagi peserta lelang yang bukan Warga Negara Indonesia, dikarenakan akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan lelang online tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang *online* pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Bagaimana upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang *online* pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas. Hasil penelitian menyatakan penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang *online* pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong tidak terjadi, khususnya bagi peserta lelang yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur kewajiban Peserta Lelang menunjukkan NPWP, sehingga membuat peserta lelang dari luar negeri dengan terpaksa membutuhkan badan hukum di Indonesia sebagai perwakilannya, yang pada akhirnya adalah tidak terciptanya asas efisiensi dan asas kompetisi. Upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang *online* pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, yaitu materi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh peserta lelang.

.....The provision on the necessity of NPWP for internet auction participants (online auction) becomes counter productive for bidders who are not Indonesian citizens, because it will cause inefficiency in the implementation of online auction. Problems in this research is how the application of the principle of efficiency and the principle of competition in the implementation of online auction airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction? How is the effort to create the principle of efficiency and the principle of competition on the execution of online auction aircraft ex Pelita Air on State Wealth Office and Serpong Auction? This study uses normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis method, because the data obtained is quality. The result of research stated that the application of efficiency principle and competition principle in the execution of online auction of airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction does not happen, especially for bidders coming from abroad. (2) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines which regulates the obligation of Bidders to indicate NPWP, thus making the auction participants from

abroad is forced to require legal entity in Indonesia as its representative, which in the end is not the creation of the principle of efficiency and the principle of competition. Efforts to create the principle of efficiency and the principle of competition on the implementation of online auction aircraft ex Pelita Air at the Office of State Assets and Auction Serpong, the material legislation with regard to fairness for all bidders.